GEREJA DAN NEGARA: REFLEKSI ATAS TANTANGAN MASYARAKAT INDONESIA DAN PANCASILA

Suatu Pendekatan Sosiologis[1]

Francisia SSE Seda

Abstract:

Pancasila is basic for the life of the nation and society in Indonesia. The Church as an element in the Indonesian society has a specific contribution in this civic life. This contribution could not be separated from "new relationship" between the elements of society-state-market. This new relationship is coloured by the dynamic of societal life after 1998, the new cultural bond, problems of poverty, environment damage and ongoing development. The Church's contribution could be enlightement in various levels of societal life, such as, guide for social conduct, network creation, development that respons the people's need, development of the elements of society that is characterized by multiculturalism to achieve a just, prosper, and peaceful society.

Kata Kunci:

Masyarakat-Negara-Pasar, nasionalisme, pasar global, komunitas lokal, kemandirian pasar, globalisasi, ketahanan budaya, kelompok keagamaan, kemiskinan, eksklusi sosial, kerusakan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, kontribusi Gereja Indonesia.

1. Pendahuluan: Relasi Triangular Masyarakat-Negara-Pasar

Pembahasan mengenai Gereja dan Negara sudah cukup kerap dan jamak diijabarkan baik secara ilmiah maupun secara populer. Pada umumnya pembahasan yang dijabarkan berkisar mengenai relasi antara Gereja dan Negara ditinjau dari sudut politik dan bukan secara sosiologis. Makalah ini akan membahas relasi antara Gereja dan Negara di dalam konteks refleksi atas tantangan Bangsa Indonesia dan Pancasila dengan menggunakan pendekatan sosiologis.

Secara sosiologis, relasi antara Gereja dan Negara lebih dikontekstualisasikan ke dalam relasi antara Gereja sebagai bagian dari Masyarakat dengan Negara sebagai entitas yang secara institusional mempunyai wewenang dan legitimasi

hukum untuk menerapkan berbagai kebijakan yang secara kolektif mengikat seluruh anggota masyarakat demi kepentingan bersama[2]. Gereja sebagai bagian dari masyarakat secara sosiologis dapat ditinjau secara umum dari dua aspek; pertama, sebagai komunitas kaum beriman, atau kedua, sebagai institusi keagamaan yang terorganisasikan dengan baik dan memiliki legitimasi di kalangan para pengikut agama yang bersangkutan[3].

Relasi antara Gereja dengan Negara ini perlu dikontekstualisasikan pula di dalam konteks relasi triangulasi antara Gereja, Negara, dan Pasar. Secara sosiologis, pasar adalah gejala sosial yang dipengaruhi oleh relasi sosial dan persaingan status. Sehingga pasar bersama dengan organisasi bisnis dan gejala ekonomi lainnya senantiasa tertanam di dalam masyarakat dan bukan berada di luar struktur-struktur sosial yang lain[4] Konsep ketertanaman sosial (*social embeddedness*) adalah konsep kunci di dalam pemahaman sosiologi mengenai pasar, organisasi bisnis, dan gejala ekonomi lainnya.

Makalah ini memberikan gambaran umum mengenai relasi antara Gereja dan Negara di dalam konteks relasi triangulasi Masyarakat, Negara, dan Pasar. Di dalam konteks relasi triangulasi ini pula, berbagai tantangan Masyarakat Indonesia akan dibahas dan keterkaitan semua ini dengan Pancasila. Pemetaan berbagai tantangan sosial yang dihadapi oleh Masyarakat Indonesia yang sudah cukup kerap dibahas di dalam lingkungan internal Gereja Katolik adalah radikalisme agama, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan hidup. Hal ini misalnya tampak dalam Hasil Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia 2005 di mana ketiga tantangan sosial tersebut cukup mendapatkan penekanan dan sangat disadari akan terus menjadi permasalahan yang akan dihadapi oleh Masyarakat Indonesia.[5]

Sebelum membahas berbagai tantangan masyarakat Indonesia di dalam konteks relasi antara Gereja dan Negara dengan menggunakan relasi triangulasi antara Negara, Masyarakat, dan Pasar sebagai alat analisa secara konseptual, terdapat beberapa hal yang perlu terlebih dahulu diberikan catatan secara khusus.

Catatan khusus tersebut menyangkut hubungan antara Negara-Bangsa *(nation state*), Nasionalisme di dalam konteks tarik menarik antara proses globalisasi dengan proses desentralisasi. Pembahasan mengenai Nasionalisme dan Negara-Bangsa di dalam konteks Globalisasi merupakan diskursus yang secara aktual tengah dihadapi oleh banyak negara-bangsa pada tataran global. Demikian pula diskursus mengenai desentralisasi atau di dalam konteks Indonesia, Otonomi Daerah, pada saat sekarang ini menjadi tantangan tersendiri bagi berbagai negara-bangsa terutama yang mempunyai ciri diversitas dan heterogenitas yang tinggi.

2. Permasalahan Konseptual: Nasionalisme dan Negara-Bangsa di dalam Konteks Relasi Triangular Masyarakat-Negara-Pasar

Secara konseptual Nasionalisme dan Negara-Bangsa merupakan konstruk teoretis yang baru beberapa abad lalu dikembangkan sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan negara-bangsa memasuki era modern. Di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, konsep Nasionalisme dan Negara-Bangsa merupakan perkembangan yang terjadi sekitar seabad terakhir, tepatnya sejak awal abad ke-20 yang ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi pergerakan dengan tujuan untuk mencapai kemerdekaan dari kekuatan kolonial Belanda.[6]

Konstruk ilmiah mengenai Nasionalisme dan Negara-Bangsa merupakan konstruk teoretis yang berorientasi pada peran Negara. Negara sebagai struktur dan Negara sebagai aktor secara sosiologis mendominasi berbagai diskursus ilmiah mengenai kehidupan publik. Hal ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Perdebatan konseptual dan teoretis tetap mengasumsikan bahwa Negara adalah *jangkar utama* dari kehidupan bermasyarakat. Salah satu kontribusi konseptual dari Benedict R.O.G. Anderson adalah bahwa Nasionalisme dan Negara-Bangsa ditinjau sebagai *imagined communities* dan bukan *imagined states*. Anderson menjadi salah seorang akademisi yang meninjau Nasionalisme dan Negara-Bangsa bukan dari orientasi Negara melainkan dari perspektif Komunitas.

Proses Globalisasi dan Desentralisasi (Otonomi Daerah) secara konseptual mendatangkan permasalahan bagi Nasionalisme dan Negara-Bangsa karena globalisasi berorientasi pada Pasar sedangkan desentralisasi berorientasi pada Komunitas. Pada tataran praksis, peran Negara tidak lagi dominan secara politik, ekonomi, dan sosial seperti dua abad terakhir. Pasar pada tataran global dan komunitas pada tataran lokal mulai menandingi peran dan kekuatan Negara-Bangsa.

Ketika *keresahan* mulai dirasakan di dalam konteks Nasionalisme Indonesia pada saat sekarang ini, hal itu terjadi karena nasionalisme senantiasa dikaitkan dengan Negara-Bangsa di mana peran Negara masih sangat dominan. Nasionalisme tidak dihubungkan dengan Pasar maupun Komunitas. Karena *diasumsikan* Nasionalisme *hanya* mungkin terjadi di dalam konteks Negara-Bangsa dan bukan Pasar maupun Komunitas. Menguatnya peran Pasar dan Komunitas secara politis, ekonomis, dan sosial yang mulai mengimbangi kekuatan bahkan di dalam jangka pendek dapat melampaui kekuatan Negara dianggap sebagai ancaman bagi nasionalisme. Negara tidak menjadi lemah, yang terjadi adalah bahwa di dalam triangulasi negara-bangsa, pasar, dan komunitas, pasar yang ditandai dengan proses globalisasi dan komunitas yang dicirikan oleh otonomi daerah mulai mengimbangi kekuatan negara.

Permasalahan konseptual adalah bahwa selama Nasionalisme senantiasa dikaitkan dengan Negara-Bangsa, maka perimbangan kekuatan di dalam

hubungan triangular antara Negara-Bangsa, Pasar, dan Komunitas dimaknai sebagai sebuah *ancaman* bagi keberadaan nasionalisme. Pertanyaan konseptual yang dapat diajukan adalah apakah Nasionalisme *senantiasa* perlu dikaitkan dengan Negara-Bangsa? Jika jawabannya adalah ya, maka memang sekarang perlu merasa resah karena proses globalisasi dan otonomi daerah sudah mulai mengimbangi dan bahkan dapat melampaui kekuatan negara-bangsa. Jika tidak, maka pertanyaan yang kemudian dapat diungkapkan adalah apakah ada *semacam nasionalisme pasar* atau *serupa nasionalisme komunitas?* Ataukah yang ada mungkin **kemandirian pasar** tanpa mengenal batas negara-bangsa dan **otonomi komunitas lokal** yang juga tidak mengakui negara-bangsa. Dengan kata lain, yang ada adalah tarik-menarik di antara pasar pada tataran global dengan komunitas pada tataran lokal tanpa melalui mediasi pada tataran negara-bangsa. Konsep negara-bangsa menjadi semakin lama berkurang relevansinya. Dan selama nasionalisme *hanya* dikaitkan dengan negara-bangsa maka nasionalismepun dapat dianggap semakin tidak bermakna.

2.1 Nasionalisme Negara-Bangsa di tengah Tarik-Menarik antara Pasar Global dengan Komunitas Lokal[7]

Proses globalisasi telah semakin memperkuat pasar pada tataran global yang oleh Anthony Giddens dimaknai dengan melampaui batas ruang dan waktu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir pada saat sekarang ini telah memungkinkan terjadinya proses globalisasi semacam ini. Hal ini memberikan implikasi yang luas secara politis, ekonomis, dan sosial. Di dalam konteks nasionalisme dan negara-bangsa, proses globalisasi yang dimotori oleh pasar ditanggapi oleh semakin menguatnya kemandirian komunitas lokal (otonomi daerah). Baik globalisasi maupun otonomi daerah saling tarik-menarik dan negara-bangsa dengan nasionalismenya *dipersepsikan* semakin tidak lagi relevan (*obsolete*) pada saat sekarang ini.

Inilah *keresahan* yang dirasakan oleh sementara kalangan di Indonesia sekarang ini. Negara-bangsa dan nasionalismenya seolah-olah mengalami *ancaman* dari pasar dengan proses globalisasinya dan dari komunitas lokal dengan otonomi daerahnya.

Untuk melihatnya dari perspektif Benedict Anderson, yang terjadi adalah *imagined communities* bukan di dalam konteks negara-bangsa melainkan komunitas lokal dan pasar global. Seorang individu yang bekerja sebagai petani di Flores Barat tidak lagi mengimajinasikan dirinya sebagai anggota dari negara-bangsa Indonesia, melainkan anggota komunitas lokal Manggarai yang tengah memperjuangkan keberadaannya di tengah *gempuran* proses globalisasi. Sedangkan pada saat yang bersamaan, seorang pengusaha kain tenun di Flores Barat juga tidak lagi mengimajinasikan dirinya sebagai anggota negara-bangsa

Indonesia yang harus memperjuangkan nasionalisme Indonesia, melainkan apa dan bagaimana ia dapat memperdagangkan kain tenun Manggarainya di pasar global sehingga orang-orang lain dapat membelinya. Kedua orang ini berada di dalam wilayah teritorial negara Indonesia, tetapi mereka mengimajinasikan diri mereka sebagai anggota komunitas lokal atau pasar global dan *bukan* warga negara-bangsa Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah makna negara-bangsa dan nasionalisme Indonesia bagi sang petani dan sang pengusaha Manggarai, Flores Barat sekarang ini?

Wajah negara-bangsa yang paling dekat pada tataran praksis bagi sang petani dan sang pengusaha Manggarai di Flores Barat tersebut adalah aparat penyelenggara negara pada tingkat lokal yakni aparat kabupaten Manggarai. Sang petani masih harus bertani dan bercocok tanam sesuai dengan peraturan pemerintah lokal. Hal ini secara tragis tampak pada saat terjadinya konflik lahan pertanian kopi beberapa tahun lalu. Bagi sang pengusaha kain tenun, ia masih harus mendapatkan ijin untuk berusaha dan mengikuti peraturan perdagangan yang dikeluarkan oleh aparat kabupaten Manggarai. Kerap terjadi, yang menjadi masalah bagi mereka adalah aparat penyelenggara negara yang ialah wajah negara-bangsa di tingkat lokal. Sehingga hal ini semakin membuat mereka mempertanyakan apakah makna dan manfaat dari negara-bangsa dan nasionalisme Indonesia bagi kehidupan sehari-hari mereka?

Negara-bangsa dan nasionalisme merupakan konstruk sejarah yang lahir dan berkembang pada masa periode historis tertentu di dalam era modern. Khusus untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, negara-bangsa dan nasionalisme sangat erat hubungannya dengan kolonialisme Belanda. Perjuangan pada masa Kebangkitan Nasional dan Revolusi Kemerdekaan Indonesia telah melahirkan dan mengembangkan nasionalisme yang dikaitkan dengan negara-bangsa Indonesia.

Pada saat sekarang ini pasar yang dibantu oleh proses globalisasi pada tataran global dengan komunitas yang dibantu oleh proses otonomi daerah pada tataran lokal berada di dalam proses tarik-menarik tanpa terlalu memperhatikan mediasi negara-bangsa, meskipun negara-bangsa masih tetap mempunyai peranan yang berarti. Selama nasionalisme *hanya* dikaitkan dengan negara-bangsa maka selama itu pula globalisasi dan otonomi daerah akan dirasakan sebagai *ancaman*.

Jargon terkenal masa kini adalah *think globally, act locally* (berpikirlah secara global, bertindaklah secara lokal). Semakin banyak individu, termasuk kita yang menjadi warga negara-bangsa Indonesia memaknai dan mengimajinasikan istilah lokal sebagai komunitas lokal dan bukan lagi komunitas negara-bangsa Indonesia. Perubahan di dalam memaknai dan mengimajinasikan diri inilah yang menjadi tantangan tetapi sekaligus peluang bagi kita semua di masa depan.

2.2 Ikatan Budaya, Nasionalisme Indonesia dan "Ketahanan Budaya"?

Membahas Ikatan Budaya, Nasionalisme Indonesia dan "Ketahanan Budaya" merupakan cerminan pula adanya asumsi mengenai hubungan antara Nasionalisme dengan Negara-Bangsa. Asumsi ini adalah perlunya "Ketahanan Budaya" demi mempertahankan Nasionalisme Indonesia (*perlu dibaca: nasionalisme negara-bangsa Indonesia)*. Di dalam konteks proses tarik-menarik antara proses globalisasi pada tataran global dengan proses desentralisasi atau yang lebih populer dinamakan dengan otonomi daerah pada tataran lokal maka terdapat beberapa aspek yang patut untuk dipertanyakan.

Pertama, apakah yang dimaksud dengan Ikatan Budaya di sini. Tampaknya Ikatan Budaya ini dikaitkan dengan Negara Bangsa di dalam konteks Nasionalisme Indonesia. *Kedua,* apakah yang dimaksud dengan "Ketahanan Budaya" di sini? Terdapat kesan yang cukup kuat bahwa terkandung secara implisit pengertian ***cultural containment*** di sini, di dalam arti Budaya Indonesia perlu dipertahankan "otentisitasnya" demi mempertahankan Nasionalisme Indonesia. Secara sosial dan secara sosiologis agak sulit untuk mengkaji "otentisitas" dan "Ketahanan Budaya" dari suatu negara-bangsa karena secara historis dan empiris hampir tidak ada budaya yang bersifat statis dan utuh. Hampir semua budaya bersifat hibrid dan cair (*fluid*) terutama bila dikaitkan dengan masyarakat tertentu dan bukan negara-bangsa tertentu. *Ketiga,* secara sosiologis pada umumnya membahas budaya biasanya dikaitkan dengan masyarakat dan bukan dengan negara bangsa.

Beberapa pertanyaan yang diajukan di atas ini membuat agak sulit dan kurang relevan untuk membahas Nasionalisme Indonesia yang dikaitkan dengan Ikatan Budaya dan "Ketahanan Budaya" secara sosiologis. Selain itu di dalam konteks proses tarik-menarik antara globalisasi dengan desentralisasi maka akan lebih relevan dan signifikan untuk mengkaji dan membahas aspek budaya masyarakat pada tataran global dan secara bersamaan pada tataran lokal serta bagaimana proses dinamika ini kemudian mendatangkan *fluiditas dan hibriditas baru*. Budaya masyarakat yang terus-menerus dinamis ini merupakan hal yang positif bagi perubahan sosial masyarakat. Pertanyaan yang dapat diajukan adalah apakah kemudian tradisi budaya masyarakat perlu ditinggalkan. Jawabannya terletak pada pilihan masyarakat itu sendiri baik secara individual maupun secara kolektif. Pilihan untuk mempertahankan tradisi budaya yang ada dan juga pilihan untuk tradisi budaya mana yang perlu terus dilestarikan.

Secara kritis dapat dipertanyakan lebih lanjut sejauh mana peran negara maupun peran pasar di dalam mempengaruhi perlunya tradisi budaya dilestarikan dan tradisi budaya mana yang perlu terus dipertahankan. Tradisi budaya masyarakat dapat diintervensi baik oleh negara maupun pasar. Hanya saja persoalan yang perlu dipikirkan lebih lanjut adalah aktor-aktor mana dan

atas representasi kepentingan siapa negara maupun pasar dapat melakukan intervensi. Bahkan pertanyaan serupa dapat pula diajukan pada masyarakat. Relasi kekuasaan senantiasa hadir di dalam konteks relasi triangular di antara negara, pasar, dan masyarakat. Hal inilah yang menjadi permasalahan baik secara konseptual maupun secara empiris bila mengkaji dan membahas Ikatan Budaya, Nasionalisme Indonesia dan "Ketahanan Budaya" melalui Perspektif Sosiologis.

Berbagai tantangan yang dihadapi Masyarakat Indonesia di mana Gereja secara sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan adalah radikalisme agama, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan hidup. Tantangan pertama berupa radikalisme agama di dalam makalah ini ditinjau di dalam konteks interaksi antar kelompok keagamaan pada periode Pasca Orde Baru (1998-2009).

3. Interaksi Antar Kelompok Keagamaan pada Pasca Orde Baru (1998-2009)

Masa Pasca Orde Baru yang kerap kali diberikan istilah Masa Reformasi khususnya pada tahun 1998-2009[8] memberikan suatu gambaran umum yang cukup kompleks mengenai interaksi antar kelompok keagamaan. Salah satu analisa sosiologis mengemukakan bahwa masa reformasi ini terjadi konflik, euphoria, dan kebangkitan agama di dalam masyarakat Indonesia[9] Pada masa awal transisi kekuasaan ini, mulai terjadi berbagai konflik sosial horizontal yang menggunakan atau lebih tepat menyalahgunakan masalah-masalah hubungan antar kelompok keagamaan. Berawal dari Poso (1998) hingga Ambon (1999) dan ke seluruh provinsi Maluku sampai tahun 2002. Penelitian UNSFIR (*United Nations Support Facilities for Indonesian Recovery*) menunjukkan bahwa dari semua konflik yang terjadi di Indonesia (1996-2001) sebagian besar adalah konflik yang bernuansa etnis agama.[10] Berbagai konflik ini terutama terjadi antara kelompok Kristen dengan kelompok Islam.

Pada masa Pasca Orde Baru ini, proses demokratisasi dan desentralisasi yang terus berlangsung menimbulkan semakin luasnya ruang gerak di ranah publik bagi berbagai kelompok di dalam masyarakat termasuk berbagai kelompok keagamaan. Baik kelompok keagamaan yang cenderung liberal, moderat, konservatif, maupun radikal fundamentalis. Penguatan masyarakat civil (*civil society*) yang diharapkan akan meningkatkan keadaban publik secara demokratis justru menimbulkan *unintended consequences* (konsekuensi-konsekuensi yang tidak diharapkan) di dalam arti kekuatan-kekuatan yang non demokratis atau bahkan anti demokratis memanfaatkan ranah publik yang semakin terbuka ini.

Kelompok-kelompok radikal fundamentalis keagamaan semakin meningkat baik pada level nasional maupun daerah. Kelompok-kelompok semacam ini bahkan menyerang dengan tindak kekerasan bukan hanya kelompok-kelompok keagamaan yang lain, tetapi bahkan sesama kelompok seagama yang dianggap "sesat" atau "bidaah" menurut doktrin dan ajaran agama yang menurut

interpretasi mereka adalah "benar". Interpretasi yang formalistik terhadap doktrin dan ajaran agama membuat berbagai kelompok fundamentalis radikal ini sangat tidak toleran (intoleran) terhadap kelompok-kelompok lain yang seagama, berlainan agama, maupun yang non-agama.

Proses desentralisasi kewenangan dan kekuasaan dari pusat ke daerah yang lebih dikenal dengan otonomi daerah justru menimbulkan proses revitalisasi adat dan interpretasi terhadap ajaran agama yang tidak semuanya kondusif bagi perkembangan masyarakat adab yang demokratis dan toleran. Berbagai peraturan daerah yang bernuansa keagamaan cenderung sarat dengan sikap intoleransi terhadap keanekaragaman yang terdapat di dalam masyarakat termasuk pembatasan hak kaum perempuan. Kaum perempuan yang sudah sejak lama mengalami proses subordinasi semakin mengalami peningkatan proses ini akibat dari adanya otonomi daerah.

Interaksi antar kelompok keagamaan di dalam masyarakat Indonesia pada masa Pasca Orde Baru ini perlu pula dilihat di dalam konteks global dan bukan hanya konteks masyarakat Indonesia saja. Proses globalisasi yang semakin meningkatkan dominasi sistem ekonomi kapitalis global menghadapi resistensi yang besar dari berbagai kelompok masyarakat akar rumput yang justru melakukan lokalisasi pada tingkat lokal. Sekarang ini sedang terjadi proses tarik-menarik yang luar biasa antara proses globalisasi pada tingkat global dengan proses lokalisasi pada tingkat lokal.

Demikian pula pada tingkat global sedang terjadi proses tarik menarik antara kekuasaan *superpower negara adidaya* Amerika Serikat dengan berbagai kelompok radikal fundamentalis keagamaan yang berusaha melakukan resistensi baik secara ideologis maupun secara fisik terhadap kekuasaan yang dominan ini. Bukanlah suatu kebetulan bahwa berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok keagamaan radikal fundamentalis ini menargetkan berbagai simbol kekuasaan dan dominasi Amerika Serikat. Meskipun demikian, hal ini bukanlah berarti sedang terjadi perbenturan peradaban seperti yang dinyatakan oleh Samuel Huntington di dalam artikelnya *The Clash of Civilizations* (1993*).*

Inilah suatu proses paradoksikal yang sedang terjadi pada masa sekarang ini. Pada satu sisi proses demokratisasi dan desentralisasi telah membuka peluang dan ruang yang cukup besar di dalam masyarakat Indonesia bagi tumbuh dan berkembangnya beraneka ragam kelompok-kelompok masayarakat termasuk kelompok-kelompok keagamaan. Secara khusus berbagai kelompok minoritas dan marginal semakin mempunyai ruang dan saluran untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka di ranah publik.

Tetapi pada saat yang bersamaan, di sisi lain, terbukanya peluang dan ruang gerak di ranah publik ini justru lebih dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang non demokratis bahkan anti demokatis. Pertanyaan yang

kemudian patut diajukan adalah mengapa hal ini sampai terjadi di Indonesia sekarang ini? Kenapa proses demokratisasi dan proses desentralisasi bukannya menumbuhkembangkan keadaban publik tetapi justru menimbulkan anarkisme dan tindak kekerasan yang semakin mengalami eskalasi tanpa dirasakan adanya usaha-usaha yang berarti untuk melakukan tindak menentang proses ini?

Di dalam menjawab beberapa pertanyaan di atas, sebagian pihak mengacu pada peran negara yang baik di dalam konteks global maupun konteks nasional dinilai cenderung mengalami penurunan. Pada konteks global, proses globalisasi cenderung memperkuat peran pasar di dalam konteks relasi triangulasi dengan negara dan masyarakat. Pada konteks lokal, peran masyarakat yang lebih kuat menghadapi peran pasar pada konteks global. Peran negara cenderung menjadi fasilitator dan bukan arbitrator antara pasar dengan masyarakat. Bahkan kerap kali terjadi relasi yang kolutif antara negara dengan pasar yang memperlemah daya tawar masyarakat.

Peran negara perlu lebih ditingkatkan terutama di dalam konteks interaksi antar kelompok keagamaan yang berbeda maupun di dalam kelompok keagamaan yang sama. Menurut Kusumadewi, negara harus mendidik para warga negaranya agar mempunyai kesadaran multikultural yang cukup tinggi dan negara harus memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan hak sebagai warga negara tanpa adanya dominasi, diskriminasi, dan eksklusi dari kelompok tertentu terhadap individu dan kelompok lain.[11]

Permasalahan di Indonesia sekarang ini, ternyata para aparat negara, yakni, pemerintah belum berhasil untuk menjadi pihak arbiter yang adil bagi setiap warga negara tanpa memandang etnis, ras, agama, latar belakang sosial ekonomi, gender, usia, maupun ideologi mereka. Para aparat negara cenderung bersikap ragu-ragu atau membiarkan konflik horizontal berlangsung terlalu lama tanpa adanya penyelesaian yang adil dan tuntas. Bahkan terdapat ketidakpercayaan yang cukup mendalam antara masyarakat sebagai warga negara dengan pemerintah sebagai aparat negara. Sehingga justru para warga negara menganggap bahwa aparat negara yang cenderung menjadi sumber konflik antar kelompok masyarakat termasuk kelompok keagamaan.

Pertanyaan yang juga signifikan untuk ditanyakan adalah bagaimana dengan peran masyarakat sendiri? Tentunya termasuk di dalamnya peran Gereja Katolik Indonesia sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan? Salah satu jawaban yang dapat diberikan adalah bahwa masyarakat perlu melakukan sebuah rekonstruksi kultural. Kusumadewi memberikan batasan rekonstruksi kultural sebagai suatu pembongkaran budaya dan penataan kembali kultur sosial masyarakat dari eksklusivisme menuju non-eksklusivisme, dari kompetisi menuju kerjasama dan solidaritas sosial, dari rasa curiga menuju ke rasa saling percaya. Termasuk pula mendekonstruksi cara pandang yang monokulturalis

menuju ke multikulturalis.[12] Pada tataran gagasan yang ideal, dapat disepakati usulan dari Kusumadewi ini. Hanya saja pada tataran praksis, akan sangatlah sulit untuk menerapkan gagasan ini.

Persoalan utama terletak pada konsep multikulturalis itu sendiri. Konsep yang pada dasarnya mengakui adanya keragaman budaya serta penghargaan terhadap berbagai budaya yang berbeda itu tidaklah menyinggung persoalan mendasar di dalam interaksi antar kelompok di dalam masyarakat, yakni, relasi kekuasaan. Konflik sosial cenderung tumbuh dan berkembang karena adanya kompetisi antar berbagai kelompok termasuk kelompok keagamaan untuk memperebutkan berbagai sumber daya yang langka, misalnya, akses dan kesempatan bagi para anggota kelompoknya untuk menduduki berbagai posisi strategis di dalam pemerintahan maupun dunia usaha sehinga dapat mempengaruhi kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Di dalam konteks terminologi Gereja, anjuran agar setiap umat dapat menjadi "garam dan terang dunia" meskipun dimaksudkan sebagai sesuatu yang positif, pada sisi lain dapat diinterpretasikan atau disalah interpretasikan oleh kelompok-kelompok keagamaan lain sebagai usaha dari para anggota kelompok minoritas untuk "menyusupi" dan secara diam-diam atau bahkan sembunyi-sembunyi mempengaruhi kehidupan bernegara dan bermasyarakat dengan nilai-nilai Katolik yang bukanlah nilai-nilai dari kelompok mayoritas. Kesalahan dalam interpretasi ajaran Gereja ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan atau bahkan kecurigaan dari berbagai kelompok keagamaan yang bukan Katolik.

Apakah mungkin terminologi agama yang pada dasarnya eksklusif semakin menjadi terminologi inklusif ke-Indonesia-an? Bagaimana nilai-nilai berdasarkan pesan Injili dapat disampaikan dengan bahasa-bahasa yang lebih humanis dan universal sebagai nilai yang diyakini semua orang? Atau dengan kata lain, bagaimana menggarami atau menerangi dunia ini tanpa menimbulkan kecurigaan dan kekhawatiran dari kelompok-kelompok keagamaan lain? Salah satu jawabannya mungkin adalah dengan menumbuhkembangkan kepercayaan bahwa menjadi garam dan terang dunia itu bukanlah semata-mata pesan Injili, melainkan pesan universal kemanusiaan bagi setiap pemeluk agama dan kepercayaan, bahkan juga bagi mereka yang tidak beragama.

Transformasi dari pesan Injili yang eksklusif menjadi pesan universal humanis yang inklusif merupakan tantangan bagi Gereja Katolik Indonesia sekarang dan di masa mendatang. Terutama bagaimana menjaga keseimbangan pada saat yang bersamaan antara yang universal, inklusif, dan humanistik, dengan yang partikularistik, eksklusif, dan doktrin. Karena pada akhirnya, mereka ini bukanlah suatu dikotomi yang terpisah dan berdiri sendiri, melainkan lebih merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

Gereja Katolik Indonesia pada saat yang bersamaan perlu universal tetapi juga partikular, perlu inklusif tetapi juga eksklusif, perlu humanistik tetapi juga doktrin. Hanya dengan menjaga keseimbangan ini secara berkesinambungan maka Gereja Katolik Indonesia dapat menjadi bagian yang integral dari masyarakat Indonesia tetapi sekaligus mempertahankan identitas ke-Katolik-annya.

Tidak ada 'resep' atau 'strategi' yang langsung 'siap pakai' untuk dapat menyelesaikan persoalan dan permasalahan interaksi antar kelompok keagamaan yang berbeda terutama di dalam masyarakat Indonesia selama dekade terakhir. Hanya ada kebijaksanaan yang dapat memberikan harapan:

> "Hanya karena kita adalah 100% Indonesia maka kita adalah 100% Katolik, demikian pula sebaliknya, hanya karena kita adalah 100% Katolik maka kita adalah 100% Indonesia,".

Interaksi sosial antar kelompok keagamaan akan dapat berjalan lebih kondusif jika setiap orang Katolik Indonesia dan setiap anggota kelompok keagamaan dan kepercayaan di tanah-air tercinta ini dapat menyatakan dan melakukan hal yang sama di dalam konteks agama dan kepercayaan masing-masing dan di dalam kehidupan keseharian maupun kehidupan bermasyarakat.

Selain radikalisme agama, tantangan kedua yang dihadapi oleh Masyarakat Indonesia adalah Kemiskinan yang terus-menerus masih menjadi permasalahan sosial yang besar sampai sekarang ini. Untuk itu, Gereja perlu secara lebih mendalam dan lebih terlibat di dalam menghadapi persoalan ini.

4. Kemiskinan dan Eksklusi Sosial

Kemiskinan di dalam kajian sosiologis pada umumnya dimaknai dengan konsep *Deprivasi Sosial*. Suatu kondisi sosial di dalam masyarakat di mana sekelompok masyarakat tertentu tidak mampu untuk hidup dengan baik di dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Deprivasi sosial ini terdiri dari 2 (dua) jenis; yakni, pertama, *Deprivasi Absolut* dan kedua, *Deprivasi Relatif*.

Deprivasi Absolut adalah kondisi di mana sekelompok masyarakat tertentu tidak mampu untuk mendapatkan sumber daya mendasar yang dibutuhkan untuk mempertahankan berfungsinya kesehatan dan kebutuhan jasmani pribadi secara individual. Deprivasi Relatif adalah kemampuan untuk mengukur kesenjangan antara kondisi kehidupan berbagai kelompok di dalam masyarakat dengan kondisi kehidupan yang dinikmati mayoritas masyarakat.

Terdapat dua pendekatan di dalam menjelaskan kondisi kemiskinan atau deprivasi sosial ini. Budaya Kemiskinan dan Budaya Ketergantungan pada dasarnya menganggap kelompok orang miskin bertanggung-jawab akan kondisi

kemiskinan mereka sendiri. Sedangkan Kemiskinan Struktural menganggap bahwa terdapat faktor-faktor struktural yang menyebabkan terjadinya kondisi kemiskinan di kelompok masyarakat tertentu.

Eksklusi Sosial adalah proses-proses di mana individu-individu tidak dapat memiliki akses dan kesempatan yang setara dengan para anggota masyarakat umumnya untuk dapat terlibat secara utuh dan lengkap di dalam hidup bermasyarakat. Eksklusi Sosial adalah kondisi yang lebih umum daripada deprivasi sosial atau kemiskinan.[13]

Secara konseptual kondisi *Deprivasi Sosial* atau Kemiskinan hampir selalu menimbulkan terjadinya proses Eksklusi Sosial. Sedangkan proses Eksklusi Sosial tidak selamanya menghasilkan kondisi Deprivasi Sosial. Berhubung proses Eksklusi Sosial tidak hanya disebabkan oleh kondisi Kemiskinan saja.

Pada tahun 1996/1997, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia melakukan penelitian tentang Pola Penanganan Kemiskinan di Perkotaan. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian I yang dilakukan di tahun 1995, dan di tahap kedua ini lebih menekankan pada identifikasi pola penanganan kemiskinan di perkotaan yang dilakukan oleh Organisasi Sosial (Orsos) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sejumlah 32 Orsos/LSM yaitu 8 Orsos/LSM di Medan, 5 Orsos/LSM di Bandung, 10 Orsos/LSM di Surabaya, dan 9 Orsos/LSM di Ujung Pandang. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif agar mendapat pemahaman yang mendalam tentang pola penanganan kemiskinan yang dilakukan Orsos atau LSM tersebut dengan model wawancara *focus group*. Hasilnya, terdapat dua besaran pola penanganan kemiskinan di perkotaan, yaitu dengan santunan dana pendidikan dan peningkatan penghasilan keluarga miskin. Strategi penanganan yang dilakukan ada empat jenis, yakni 1) pendampingan, 2) penciptaan hubungan keluarga miskin dengan pemilik sumber, 3) pemberian bimbingan, pengetahuan, serta keterampilan, dan 4) pengembangan swadaya masyarakat. Diketahui dari penelitian ini bahwa LSM dan Orsos lebih banyak menempatkan sasaran pelayanan (keluarga miskin) sebagai objek daripada sebagai subjek pelayanan. Keluarga miskin di sini lebih banyak dilihat secara ekonomi daripada aspek sosialnya, dan kebanyakan bekerja sebagai pedagang kecil dibandingkan menjual jasa. Akhir penelitian ini mengusulkan pola penanganan yang lebih berorientasi pada "pemberdayaan" kepada dua bentuk keluarga, yaitu keluarga miskin yang bekerja di bidang jasa dan keluarga miskin yang bekerja di bidang usaha (pedagang kecil) dan akan diujicoba pada penelitian ketiga[14].

Sementara studi empiris Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Departemen Pertanian pada tahun 1995 yang dilakukan di tujuh belas Provinsi di Indonesia, menyimpulkan bahwa terdapat enam faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu (1) rendahnya kualitas sumber daya manusia, hal ini ditunjukkan oleh rendahnya

tingkat pendidikan, tingginya angka ketergantungan, rendahnya tingkat kesehatan, kurangnya pekerjaan alternatif, rendahnya etos kerja, rendahnya keterampilan dan besarnya jumlah anggota keluarga; (2) rendahnya sumber daya fisik, hal ini ditunjukkan oleh rendahnya kualitas dan jumlah asset produksi serta modal kerja; (3) rendahnya penerapan teknologi, ditandai oleh rendahnya penggunaan input dan mekanisasi pertanian; (4) rendahnya potensi wil ayah yang ditandai oleh rendahnya potensi fisik dan infrastruktur. Kondisi fisik ini meliputi iklim, tingkat kesuburan, dan topografis wilayah, sedangkan infrastruktur meliputi irigasi transportasi, pasar, kesehatan, pendidikan, pengolahan komoditas pertanian, listrik dan fasilitas komunikasi; (5) kurang tepatnya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam investasi dan pengentasan kemiskinan, (6) kurang berperannya kelembagaan yang ada, kelembagaan tersebut meliputi pemasaran, penyuluhan, perkreditan dan sosial.[15]

Data statistik dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2008, jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 34,96 juta orang atau 15,42% dari total penduduk Indonesia. Selain data mengenai persentase penduduk miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada periode Maret 2007-Maret 2008, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung menurun dengan P1 dari 2,99 menjadi 2,77 dan P2 dari 0,84 menjadi 0,76 pada periode yang sama. Pada bulan Maret 2008, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan 2,07 sedangkan untuk perdesaan mencapai 3,42. Sedangkan nilai Indeks Keparahan Kemiskinan untuk perkotaan 0,56 sedangkan di daerah perdesaan mencapai 0,95. Sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi daripada daerah perkotaan.[16]

Data empiris berupa hasil penelitian lapangan dan data BPS mengindikasikan bahwa kemiskinan dan eksklusi sosial merupakan permasalahan sosial yang harus diperhatikan dan dicari pemecahan masalah yang komprehensif baik oleh Pemerintah, Pasar, maupun masyarakat termasuk Gereja sebagai bagian integral dari Masyarakat Indonesia. Selain kemiskinan dan eksklusi sosial, tantangan lain yang perlu dihadapi adalah kerusakan lingkungan hidup yang bisa ditemukan di seluruh Indonesia.

5. Kerusakan Lingkungan Hidup

Salah satu dampak dari kerusakan lingkungan hidup di Indonesia sekarang ini adalah tantangan yang dihadapi Indonesia berupa perubahan iklim.[17] Adapun yang dimaksud dengan perubahan iklim di sini adalah akibat pemanasan muka bumi karena menebalnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Sekarang ini konsentrasi CO_2 (gas rumah kaca terbanyak di atmosfer) mengalami peningkatan menjadi sekitar 380 ppm.[18] Peningkatan konsentrasi CO_2 ini disebabkan oleh

kegiatan manusia (*anthropogenic*) yang melibatkan penggunaan bahan bakar fosil.[19]

Terdapat 2 (dua) cara Penanggulangan Perubahan Iklim:[20]

a. Mitigasi: untuk mencegah, menghentikan, menurunkan, atau membatasi pelepasan emisi gas buangan, gas pencemar udara di atmosfer. Tujuan mitigasi adalah untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi.

   Usaha mitigasi ini berupa:

   1) Pengurangan penggunaan sumber daya energi yang banyak menghasilkan emisi CO_2 yang dihasilkan oleh pembakaran minyak bumi, batu bara, dan gas bumi untuk berbagai kegiatan pembangunan.

      Penanggulangan Perubahan Iklim:

   2) Menambah atau memperluas sistem bumi yang berfungsi sebagai penyerap dan penyimpan karbon secara alami seperti hutan dan lautan.

b. Adaptasi: untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan yang terjadi.

   Usaha adaptasi ini berupa: melakukan identifikasi dan pemetaan lokasi dan kelompok-kelompok komunitas mana yang paling rentan terhadap dampak dari perubahan iklim. Usaha adaptasi ini menjadi agenda prioritas utama bagi negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia.

6. Penanggulangan Perubahan Iklim:

Di dalam konteks beradaptasi dengan dampak perubahan iklim ini, maka perlu terintegrasi dengan mewujudkan "Pembangunan yang Berkelanjutan" *(Sustainable Development).*

Ada 4 unsur di dalam Adaptasi:

a. Perkiraan dan Pemetaan Kerentanan Sosial dan Lingkungan
b. Peningkatan Kesadaran dan Sumber Daya Masyarakat
c. Reformasi Kebijakan Publik dan Peningkatan Kapasitas Lembaga-Lembaga Publik
d. Melaksanakan Pembangunan dengan Sistem Ekonomi dan Strategi Pembangunan yang rendah karbon.

7. Pembangunan Yang Berkelanjutan

Definisi: Pembangunan yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi-generasi masa depan untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka.[21] Implikasi dari hal ini adalah perlunya pengambilan keputusan yang terintegrasi sehingga mampu menyeimbangkan berbagai kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat dengan kapasitas regeneratif dari lingkungan hidup.

Ada 3 (tiga) Dimensi dari Pembangunan yang Berkelanjutan:[22]

a. Dimensi Ekonomi
b. Dimensi Lingkungan
c. Dimensi Sosial

Ketiga dimensi ini kerap diberikan nama dengan *The Triple Bottom Line* yang perlu secara seimbang diberlakukan di dalam suatu program pembangunan yang berkelanjutan. Khusus Dimensi Sosial dari Pembangunan Yang Berkelanjutan mempunyai fokus utama adalah untuk mempertahankan stabilitas dari sistem sosial dan juga sistem budaya masyarakat.

Terdapat 10 (sepuluh) Dimensi Sosial dari Pembangunan yang Berkelanjutan:[23]

a. Pengurangan Kemiskinan
b. Pembangunan yang Partisipatoris
c. Proses musyawarah
d. NGOs
e. Gender dan pembangunan
f. *Resettlement* yang tidak sukarela
g. Masyarakat Adat
h. Proses Eksklusi Sosial
i. Analisa Sosial
j. Berbagai Indikator Pembangunan Sosial

Adapun terdapat beberapa kritik terhadap Pembangunan yang Berkelanjutan:

a. Masih menggunakan pendekatan pembangunan yang berparadigma *developmentalis*
b. Masih belum memperhatikan akar permasalahan dari hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketidakadilan sosial, dan permasalahan lingkungan hidup (termasuk perubahan iklim), yakni permasalahan struktur yang timpang
c. Masih menggunakan pendekatan yang berorientasi pada negara dan aparatur birokrasi pemerintah

d. Masih menggunakan metode pengukuran yang positivistik dan lebih menekankan pada output dibandingkan dengan proses
e. Masih memakai pendekatan pembangunan yang *ahistoris*, linear, tidak kontekstual dan tidak memperhatikan diversitas dari berbagai komunitas lokal

7.1 Pendekatan Alternatif

Pendekatan yang lebih bersifat lokal dan kontekstual, di dalam arti identifikasi dan pemetaan berbagai kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak dari perubahan iklim:[24]

a. Memperhatikan berbagai kondisi geografis dan sosio demografis lokal (mis., DAS Mekong)
b. Memperhatikan Biodiversitas Agrikultur dan Biodiversitas Alami

7.2 Pendekatan Alternatif

Mengenal dan Melakukan Dokumentasi terhadap berbagai Sistem Pengetahuan Lokal (baik formal maupun informal).

Menggunakan Pendekatan Analisis Sistem.

Tantangan Bagi Masyarakat Asia Tenggara (termasuk Indonesia)

Berdasarkan data empiris dari berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh SEARCA (Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research In Agriculture), di Filipina (2007) adalah:

a. Kesenjangan di dalam pengetahuan antara masyarakat lokal dengan komunitas internasional tentang dampak dari perubahan iklim
b. Perbedaan perspektif mengenai *Survival* dari masyarakat lokal di dalam menghadapi dampak dari perubahan iklim
c. Perlunya mengintegrasikan antara berbagai kebutuhan dasar dan *survival* dari berbagai masyarakat dan komunitas lokal dengan menghadapi dampak dari perubahan iklim di dalam konteks pelestarian lingkungan hidup
d. Perlunya identifikasi dan pelaksanaan yang berkelanjutan dari berbagai mekanisme menghadapi *(coping mechanisms)* terhadap dampak dari perubahan iklim yang telah dilakukan oleh berbagai komunitas lokal
e. Perlunya perspektif yang lebih jelas dan analisa yang lebih tepat (akurat) antara Perubahan Iklim, berkurangnya Biodiversitas, dan Kemiskinan khususnya pada masyarakat lokal

7.3 Pembelajaran dari Indonesia: Kasus Minyak Kelapa Sawit

Di dalam konteks Hubungan antara Usaha Mitigasi terhadap Perubahan Iklim dengan Hutan:[25]

a. Peran Potensial dari *Biofuel* sebagai sumber energi alternatif dibandingkan dengan *Fossilfuel.*
b. Peningkatan Permintaan Pasar Global terhadap Minyak Kelapa Sawit dan dampaknya terhadap Peningkatan Deforestasi di Indonesia.
c. Minyak Kelapa Sawit sebagai sumber dari *Biofuel.*
d. Peningkatan permintaan pasar di Eropa untuk minyak kelapa sawit mencapai 1.5 juta ton.
e. Di dalam konteks Penawaran, lebih dari 80% produksi minyak kelapa sawit di dunia dihasilkan oleh Malaysia dan Indonesia.
f. Di Indonesia, pada akhir tahun 1990-an, terdapat permintaan dari dunia usaha swasta untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit seluas hampir 16 juta hektar.
g. Malaysia dan Indonesia telah mencadangkan 40% dari total ekspor minyak kelapa sawit untuk *Biofuel*.
h. Indonesia sedang membangun dan memperluas 11 penyulingan minyak kelapa sawit.
i. Indonesia mengharapkan dapat menghasilkan US$ 1.3 milyar dari hasil ekspor *Biofuel*.
j. Di Indonesia, sejak Mei 2006, diesel di dalam negri dapat mencakup sampai 10% *biogeneous fuels*.
k. Apakah menggantikan *fossil fuels* dengan *biofuel* melalui cara menghilangkan hutan tropis adalah cara paling tepat dan efektif untuk menghadapi dampak dari perubahan iklim?
l. Diperlukan Kehendak Politik yang kuat dan Kebijakan Pembangunan yang tepat dari pihak Pemerintah Indonesia baik nasional maupun lokal.
m. Standard dan Sertifikasi perlu diberlakukan secara ketat.
n. Perlu adanya penerapan peraturan yang lebih ketat.
o. Perlu adanya peningkatan usaha pemberantasan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).
p. Perlu adanya penguatan berbagai komunitas lokal sebagai mekanisme kontrol dan penyeimbang

Permasalahan kerusakan lingkungan hidup ini perlu dihadapi dengan Pendekatan Alternatif. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah sejauh mana Gereja sebagai bagian dari Masyarakat Indonesia bisa turut aktif di dalam menanggapi dan turut memecahkan persoalan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan berbagai tantangan yang sedang dihadapi oleh Masyarakat Asia Tenggara termasuk Masyarakat Indonesia.

Di dalam konteks menghadapi berbagai tantangan utama yang dihadapi Masyarakat Indonesia maka relevan untuk menjabarkan hasil penelitian empiris yang pernah dilakukan di Jakarta pada tahun 2011 yang berusaha menjawab apa yang bisa dilakukan Gereja. Sebelum menjabarkan hasil penelitian tersebut, perlu dibahas terlebih dahulu perspektif sosiologis mengenai Gereja dan metode penelitian yang digunakan

8. Perspektif Sosiologis mengenai Gereja

Gereja secara sosiologis[26] dipandang sebagai organisasi keagamaan yang besar.[27] Para individu yang menjadi anggota dari Gereja ini cenderung, meskipun tidak semua, lahir dan dibesarkan di dalam organisasi keagamaan ini melalui tradisi permandian yang diberikan pada saat para anggota ini lahir dan belum cukup berumur untuk memahami iman yang dianut. Gereja juga cenderung bersifat universal di dalam arti, mencakup semua anggota masyarakat tanpa memandang strata (lapisan) sosial yang ada di dalam masyarakat. Gereja sebagai organisasi keagamaan yang formal dan terstruktur dapat mempunyai relasi yang cukup dekat tetapi juga cukup jauh dengan Negara tergantung pada konteks historis, sosial, kultural, dan politik yang ada.[28] Pada umumnya pustaka sosiologi yang ada cenderung memberikan contoh Gereja Katolik Roma sebagai contoh dari organisasi keagamaan yang besar, formal, terstruktur, dan universal.

Bagaimana dengan Gereja Katolik Roma sebagai komunitas kaum beriman? Cukup menarik bahwa di dalam perspektif sosiologis, cenderung sedikit pustaka yang menunjukkan Gereja Katolik Roma sebagai komunitas. Pada umumnya penekanan lebih diberikan pada organisasi dibandingkan dengan komunitas. Di dalam makalah ini, baik Gereja Katolik Roma sebagai organisasi formal maupun sebagai komunitas kaum beriman akan digunakan sesuai dengan data primer yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan.

8.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Instrumen pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan wawancara kelompok (*group interview*). Di dalam kurun waktu antara 15 Agustus 2011 sampai dengan 23 September 2011 (sekitar 5 minggu) dilakukan wawancara dengan 27 orang informan yang terdiri dari 19 informan wawancara mendalam secara individual (*in-depth interview*) dan 8 informan melalui wawancara kelompok (*group interview*). Semua wawancara dilakukan di Jakarta dan langsung oleh peneliti sendiri tanpa didampingi oleh pihak lain.

Identitas informan terdiri dari 4 (empat) orang imam (1 projo dan 3 konggregasi); 4 (empat) orang frater siswa Seminari Tinggi (1 projo dan 3 konggregasi); 1 (satu) suster dan 1 (satu) bruder. Para imam bertugas sebagai pastor paroki. Suster dan Bruder bertugas di dalam pelayanan pastoral khususnya

bagi berbagai kelompok marginal yang paling membutuhkan. Sedangkan yang lain adalah 17 informan awam. Para awam ini terdiri dari 7 orang Muslim dan 10 orang Katolik. Kaum awam Katolik terdiri dari para aktivis Gereja khususnya di dalam konteks paroki seperti pengurus Dewan Paroki, Orang Muda Katolik, dan Kelompok Kategorial baik yang berorientasi pada pengembangan sosial ekonomi maupun devosi. Kaum Muslim dipilih berdasarkan mereka yang sudah cukup lama secara teratur berinteraksi dengan pihak komunitas Katolik.

Terdapat 2 (dua) orang awam yang aktif di Keuskupan Malang dan 2 (dua) orang imam yang bekerja di Keuskupan Sintang. Sedangkan yang lain berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Berdasarkan profesi, maka 17 informan awam ini terdiri dari 2 (dua) orang nelayan, 2 (dua) orang pemulung, 1 (satu) orang istri tukang becak, 1 (satu) orang istri tukang pijat, 3 (tiga) orang ibu rumah tangga, 2 (dua) orang profesional, 2 (dua) orang aktivis, 2 (dua) orang akademisi, 1 (satu) orang birokrat, dan 1 (satu) orang mahasiswa. Berdasarkan gender terdapat 13 (tigabelas) orang perempuan dan 14 (empatbelas) orang pria. Berdasarkan usia, terdapat 11 (sebelas) orang berusia muda (di bawah 45 tahun) dan 14 (empatbelas) orang berusia paruh baya (antara 45 tahun s/d 69 tahun) serta 2 (dua) orang berusia lanjut (70 tahun ke atas).

Adapun transkrip data primer berupa hasil wawancara mendalam individual dan wawancara kelompok dilakukan oleh 3 (tiga) orang mahasiswa Katolik. Transkrip data dilakukan secara verbatim. Di dalam konteks Etika Penelitian, maka semua identitas pribadi informan berupa nama, alamat tempat kerja, alamat rumah tinggal, dan no kontak tidak dipublikasikan untuk menjaga anonimitas mereka.

Data sekunder didapatkan melalui studi pustaka terhadap data-data dan berbagai dokumen yang relevan sesuai dengan topik penelitian ini. Peneliti telah dibantu oleh 1 (satu) orang mahasiswa Katolik di dalam mendapatkan beberapa dokumen yang relevan.

8.2 Kontribusi Gereja Katolik di Indonesia

Berdasarkan data primer yang dikumpulkan, kontribusi Gereja Katolik khususnya sebagai organisasi formal adalah pada ranah spiritual moral berupa berbagai produk seperti Nota Pastoral KWI pada tahun 1997 yang berkaitan dengan Pemilu pada jaman Orba (Orde Baru) di mana umat dihimbau untuk memilih sesuai dengan hati nurani dan tidak dilarang untuk tidak memilih jika memang tidak sesuai dengan hati nurani. Beberapa informan Katolik secara khusus menekankan semangat dan keberanian di balik Nota Pastoral ini yang dikeluarkan pada saat kondisi politik belum demokratis seperti sekarang dan justru otoriter. Sebagian informan mengartikan makna frasa untuk tidak memilih jika memang tidak sesuai dengan hati nurani sebagai semacam "ijin" untuk tidak memilih (golput atau golongan putih) yang dilarang oleh Pemerintah Orde Baru

pada waktu itu. Para informan yang secara khusus menjawab ini cenderung sangat menyetujui sikap resmi Gereja Katolik sesuai dengan Nota Pastoral KWI pada tahun 1997 menjelang Pemilu dilaksanakan. Meskipun akhirnya Golkar tetap menang dan Soeharto kembali dipilih sebagai Presiden RI, tetapi "ijin" untuk memilih golput dianggap para informan sebagai salah satu terobosan untuk melakukan proses delegitimasi pada hasil Pemilu 1997. Sesuai dengan perkembangan sejarah yang kita ketahui bersama, sebagian karena krisis moneter 1997 dan pembangkangan mahasiswa akhirnya Pemerintah Orde Baru dipaksa untuk berhenti sebagai pemerintah yang sah.

Kontribusi berupa konsep dan (sebagian) tindak lanjut yang juga dikemukakan oleh beberapa informan adalah KB (Komunitas Basis) yang berupa Komunitas Basis Gerejawi (KBG) sebagai hasil SAGKI (Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia) pada tahun 2000. Beberapa informan secara spesifik menyebutkan KBG sebagai konsep yang dihasilkan oleh KWI dan mereka juga mengetahui bahwa di sebagian Keuskupan sudah ada tindak lanjut yang dilakukan untuk menerapkan KBG ini di dalam kehidupan mengGereja secara nyata. Beberapa informan ini sepakat bahwa KBG dapat dijadikan "motor penggerak" bagi kehidupan mengGereja yang lebih dinamis dan lokal kontekstual.

Kontribusi lain yang dikemukakan para informan secara spesifik adalah Nota Pastoral KWI yang berkaitan dengan Habitus Baru (yang diterbitkan pada tahun 2006) dan yang juga menjadi landasan berpikir dan semangat penyelenggaraan dari SAGKI 2005 (Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia) yang diselenggarakan oleh KWI pada pertengahan November 2005. Para informan secara khusus menghargai orientasi sosial dan ekonomi yang menjadi arah utama dari Nota Pastoral KWI ini. Hal lain yang juga mendapatkan apresiasi dari para informan adalah tindak lanjut yang secara nyata dan konkrit yang dihasilkan oleh SAGKI 2005 berdasarkan Nota Pastoral KWI yang secara khusus membahas konsep dan arti Habitus Baru di dalam konteks perkembangan masyarakat Indonesia. Beberapa informan berharap bahwa tindak lanjut yang nyata atau rencana aksi diperlukan jika Gereja Katolik ingin berkontribusi secara nyata dan langsung bagi perkembangan masyarakat Indonesia.

Kontribusi lain yang juga dihargai oleh beberapa informan adalah adanya jejaring lintas iman antar berbagai kelompok keagamaan yang secara nyata didukung oleh KWI dan berbagai Keuskupan. Jejaring lintas iman ini dianggap oleh beberapa informan baik Katolik maupun Islam sebagai suatu tindak nyata yang dapat mengurangi ketegangan antar kelompok keagamaan akibat adanya pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan agama demi kepentingan jangka pendek. Jejaring lintas iman oleh beberapa informan diharapkan dapat terus dikembangkan tetapi juga perlu memperhatikan sustainibilitas (keberlangsungan) dan efektivitas dari jejaring ini untuk konteks jangka panjang. Sehingga tidak bersifat reaktif dan ad hoc, hanya kalau ada konflik manifest atau kerusuhan

sosial yang bernuansakan ketegangan di dalam konteks relasi antar kelompok keagamaan.

Gereja Katolik sebagai komunitas kaum beriman dianggap oleh para informan memberikan kontribusi yang cukup besar di dalam arti pada tataran kehidupan berparoki. Sebagian informan berpendapat bahwa kehidupan sakramental, devosional, dan juga pelayanan sosial ekonomi didukung oleh banyaknya dan bervariasinya kegiatan pelayanan pastoral yang terdapat di dalam paroki. Para informan yang berasal dari paroki-paroki yang cukup besar dengan berbagai kegiatan pelayanan pastoral cenderung memberikan apresiasi yang cukup besar. Ini pendapat yang diajukan oleh para informan Katolik. Sedangkan para informan Muslim memberikan apresiasi khususnya pada pelayanan pastoral di bidang sosial ekonomi yang dianggap dapat sangat berkontribusi secara nyata pada kehidupan sehari-hari. Secara khusus mereka memberikan apresiasi bahwa pelayanan pastoral itu diberikan tanpa pamrih khususnya tanpa kehendak untuk menjadikan mereka beralih agama. Semua dilakukan secara transparan dan dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga rasa saling percaya ini membuat hampir tidak adanya ketegangan yang berarti.

Untuk kaum Muslim khususnya yang menjadi mahasiswa merasa bahwa meskipun kurang mengetahui apapun tentang kontribusi Gereja Katolik sebagai organisasi formal, tetapi sebagai komunitas kaum beriman, ia merasakan adanya saling kecocokan yang cukup tinggi karena berdasarkan pengakuannya sendiri, hampir semua teman, sahabat, dan kolega kerjanya adalah orang-orang Katolik. Ia berpendapat bahwa ini bukanlah kebetulan. Meskipun ia tidak pernah bersekolah di sekolah Katolik dan tidak ada keluarganya yang Katolik, tetapi, melalui perkenalan di sekolah dan universitas negeri yang ia alami, merubah semua stereotype dan prasangka negatif yang pada awalnya ada pada dirinya. Keluarganyapun sudah lebih dapat menerima kenyataan bahwa ia mempunyai sahabat Katolik. Kesaksian kehidupan sehari-hari tampaknya dapat berperan positif di dalam interaksi sosial antar kelompok keagamaan.

Kontribusi yang juga dinyatakan oleh sebagian informan adalah bahwa sebagai organisasi formal, Gereja Katolik dianggap dapat cukup cepat bergerak bila mempunyai tujuan bersama karena adanya orientasi, visi, misi, dan kebijakan yang sama. Sehingga sebagai institusi dan organisasi formal, jika ada tujuan bersama yang jelas, maka sesungguhnya kebijakan dan tindak lanjut juga dapat dengan cepat dan nyata dilakukan secara bersama-sama dan di dalam jangka waktu yang cukup singkat. Sehingga seharusnya kelambanan dan ketidakjelasan di dalam menerapkan dan melaksanakan kebijakan yang telah disepakati bersama tidak terjadi. Secara institusional dan organisasi formal, bagi sebagian informan, seharusnya Gereja Katolik lebih dapat bergerak cepat dan dapat lebih cekatan di dalam memberikan kontribusi secara aktif baik bagi kehidupan bermasyarakat maupun bagi kehidupan mengGereja di dalam kehidupan nyata sehari-hari.

Termasuk di dalam memberikan respons atau tanggapan terhadap berbagai kebijakan Pemerintah sebagai aparat penyelenggara Negara maupun berbagai peristiwa sosial, politik, ekonomi, dan kultural yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia.

8.3 Masukan dan Harapan Bagi Gereja Katolik di Indonesia

Di dalam Gereja Katolik sebagai organisasi formal, kadangkala terdapat kesenjangan antara apa yang menjadi *real need* (kebutuhan nyata) dengan *felt need* (kebutuhan yang dirasakan). Hampir semua informan Katolik (baik kaum religius maupun awam) menekankan hal ini, di mana Gereja Katolik dianggap sangat baik di dalam menghasilkan berbagai konsep yang baik dan bahkan canggih, tetapi pertanyaan yang perlu diajukan, apakah konsep yang dilahirkan itu mencerminkan kebutuhan nyata yang ada di dalam masyarakat dan yang memang dibutuhkan umat atau lebih karena kebutuhan yang dirasakan oleh hirarki dan segelintir kelompok awam. Misalnya, sebagian informan mempertanyakan, bagaimana proses perancangan sampai dengan pelaksanaan suatu konsep tertentu, apakah telah melalui proses yang partisipatif ataukah lebih dipikirkan dan diterntukan oleh sekelompok orang saja. Sehingga masukan konkret yang diberikan adalah agar berbagai produk Gereja Katolik sebagai organisasi formal agar dapat lebih berkontribusi dan dapat lebih kontekstual dengan kebutuhan nyata masyarakat dan umat, maka perlu ada metode dan proses yang lebih partisipatif.

Masukan yang juga diusulkan oleh berbagai informan, adalah bahwa Gereja Katolik sebagai organisasi formal, sudah sangat baik di dalam memikirkan dan menghasilkan berbagai konsep yang dituangkan di dalam berbagai produk resmi KWI. Tetapi hampir semua informan Katolik mempertanyakan kemampuan Gereja Katolik untuk menindaklanjuti secara nyata sampai ke masyarakat akar rumput di berbagai Keuskupan, berbagai produk yang baik itu. Ada beberapa informan misalnya, mempertanyakan, sejauh mana Komunitas Basis Gerejawi dan Habitus Baru sebagai hasil SAGKI tahun 2000 dan SAGKI tahun 2005 telah dapat diterapkan di setiap Keuskupan dan paroki. Para informan ini mengetahui dan menyadari bahwa setiap keuskupan dengan Uskup sebagai pimpinan organisasi dan Gembala umat memiliki wewenang otonom untuk tindak lanjut ini. Mereka juga mengetahui bahwa berbagai produk yang baik tersebut perlu dikontekstualisasikan sesuai dengan situasi dan kondisi lokal, tetapi hal ini bukanlah berarti bahwa tindak lanjut nyata berupa Rencana Aksi yang jelas belum dapat dihasilkan secara konkrit.

Sebagian besar informan lebih menekankan pada ARDAS (Arah Dasar) Keuskupan yang lebih mereka ketahui daripada berbagai produk Gereja Katolik sebagai organisasi formal seperti KWI. Mereka lebih mengetahui mengenai Surat Gembala Uskup dibandingkan dengan Nota Pastoral KWI. Khusus untuk

KWI, produk yang paling mereka ketahui adalah ketika KWI bersama dengan PGI mengeluarkan Surat Bersama di dalam rangka Natal dan Tahun Baru setiap tahun. Ketika ditanyakan mengapa hal ini dapat terjadi, maka hampir semua mereka menjawab bahwa terdapat masalah di dalam metode dan proses sosialisasi yang selama ini telah berlangsung. Hampir semua informan Katolik yang juga adalah aktivis paroki dan kelompok kategorial mempertanyakan efektifitas dari metode dan proses sosialisasi yang selama ini telah berlangsung. Mereka mengetahui mengenai berbagai produk KWI pada umumnya dengan mendengarkan pembacaan produk tersebut di dalam Perayaan Ekaristi sebagai pengganti homili. Juga yang mereka sesalkan adalah lebih sering imam hanya membacakan saja, tanpa memberikan pemaknaan baik secara biblis maupun secara konkrit dari Nota Pastoral ataupun Surat Gembala yang bersangkutan. Meskipun umat dibagikan berbagai produk tersebut secara tertulis, tetapi hampir tidak ada proses sosialisasi lebih lanjut secara intensif dan secara konkrit. Misalnya, dengan diskusi kelompok kecil secara berkesinambungan untuk mempelajari dan mengkontekstualisasikan Surat Gembala ataupun Nota Pastoral yang sudah dihasilkan dan diberikan. Demikian pula halnya dengan Hasil SAGKI mulai dari tahun 2000, 2005, sampai yang terakhir 2010. Pada umumnya mereka membaca di suplemen Majalah Hidup bagi yang berlangganan atau kebetulan membaca edisi tersebut. Bagi yang tidak berlangganan, sampai sekarang mereka masih belum tahu apa yang telah dihasilkan.

Pada tataran kehidupan mengGereja di paroki, di dalam arti Gereja sebagai komunitas kaum beriman, hampir semua informan awam Katolik yang sebagian besar adalah aktivis paroki, mengharapkan adanya kebersamaan sebagai komunitas (*sense of community*) yang lebih ditumbuhkembangkan oleh pastor paroki, dewan paroki, bersama-sama dengan segenap umat. Beberapa aktivis kelompok kategorial misalnya, mengeluhkan bahwa paroki di mana mereka aktif adalah paroki yang relatif besar dengan berbagai kegiatan pelayanan pastoral. Tetapi para romo paroki, menurut mereka, kurang menyapa dan menunjukkan kepedulian pada berbagai kegiatan pastoral tersebut. Bahkan untuk merayakan Perayaan Ekaristi bersama-sama saja kurang punya waktu. Mereka berpendapat hal ini disebabkan oleh karena sekarang ini para romo yang bertugas di paroki juga mempunyai tugas-tugas lain di luar paroki seperti misalnya, bertugas di Dekanat atau di Keuskupan. Sehingga terjadilah keadaan di mana para romo dipaksa oleh kondisi yang ada untuk *multitasking*. Hal ini diakui oleh keempat romo paroki yang menjadi informan dari penelitian ini. Ketika ditanyakan pada para informan awam apakah mereka sebagai aktivis paroki sudah pernah menyampaikan hal ini pada para romo paroki, perlu pula diakui adanya kendala lain.

Tidak semua paroki di dalam melaksanakan kehidupan mengGereja termasuk pelayanan pastoral mempunyai metode dan proses komunikasi yang

setara dan baik antara para imam dengan pengurus dewan paroki dan umat pada umumnya. Para informan awam yang menjadi aktivis paroki menyatakan bahwa mereka sudah cukup sering mencoba untuk berkomunikasi dengan para romo paroki. Tetapi karena kesibukan akibat multitasking yang harus dilakukan para romo ini, maka belum ada perubahan sampai sekarang.

Seperti yang dikemukakan oleh seorang awam perempuan sebagai aktivis paroki,

> "… Mungkin para romo paroki kami mendengar, tetapi belum *mendengarkan* …, tahu, tetapi belum *mengetahui*, …"
> (Wawancara pada tanggal 21 September 2011)

Atau dengan cara yang agak berbeda, tetapi dengan maksud yang sama, seorang Romo paroki dengan setengah berseloroh tetapi serius menyatakan,

> "… Kita baik awam maupun para romo paroki, *sama-sama kerja*, tetapi belum *bekerja bersama-sama*, …"
> (Wawancara pada tanggal 20 September 2011)

Proses komunikasi dan sinergitas berbagai kegiatan yang belum optimal ini selain akibat dari kesibukan para romo tetapi juga akibat dari belum optimalnya kebersamaan sebagai komunitas di dalam kehidupan mengGereja pada tataran paroki. Belum ada metode dan proses komunikasi yang setara dan timbal balik antara para romo paroki, dewan paroki, dan dengan umat.

Proses komunikasi yang belum optimal ini juga dikeluhkan oleh seorang awam aktivis paroki yang menyatakan bahwa belum ada transparansi dan akuntabilitas dari pihak dewan paroki mengenai penggunaan dana kolekte khusus untuk pendidikan Seminari sehingga ia secara terbuka menyatakan bahwa sudah sejak 5 (lima) tahun terakhir ia tidak pernah lagi bersedia memberikan kontribusi bagi pendidikan Seminari. Ia sudah beberapa kali menyatakan keberatannya pada romo paroki tetapi tetap belum ada perubahan sampai sekarang.

Pada tataran yang berbeda, yakni, Gereja Katolik di Indonesia, salah seorang frater anggota suatu konggregasi yang sedang kuliah di Seminari Tinggi menyatakan bahwa di dalam konteks Menuju Gereja yang Makin Mengindonesia, ia mempertanyakan kenyataan yang ada di mana menurutnya orientasi masih terlalu pada Gereja Katolik di Jawa (meskipun ia sendiri secara etnis adalah orang Jawa). Sambil tersenyum prihatin ia menyatakan bahwa kalau mau jujur dan berterus-terang, tampaknya Gereja Katolik yang paling berkembang terdapat di Jawa. Perlu ada kerjasama yang lebih konkret di antara Gereja Katolik di Jawa dengan di luar Jawa. Menurutnya di dalam konteks ini KWI perlu lebih banyak melakukan tindakan nyata dan bukan hanya menghasilkan berbagai produk sebagai bahan dokumentasi atau bahan pelatihan saja.

Seorang Romo Paroki juga menekankan perlu lebih banyak dan lebih intensif Gereja Katolik di Indonesia menunjukkan keberpihakan yang jelas pada berbagai kelompok marginal yang paling membutuhkan. Ia dengan suara perlahan tetapi tegas menyatakan pendapat dan visinya tersebut secara sangat sederhana dan bijak,

> "… Kalau Gereja dekat dengan orang miskin, *siapa saja akan datang*, kalau Gereja hanya dekat dengan orang kaya, *orang miskin tidak akan datang*, …"
> (Wawancara pada tanggal 3 September 2011).

Hal serupa juga disampaikan oleh seorang Bruder yang sudah lama berkarya bagi berbagai kelompok marginal yang paling membutuhkan,

> "… Gereja hadir melalui *keterlibatan*… oleh karena itu sangatlah penting bagi para frater sebagai calon imam, untuk *mengerti, merasakan, dan melakukan*, …"
> (Wawancara pada tanggal 3 September 2011)

Seorang Suster yang bekerja di kalangan kelompok-kelompok marginal yang sama menyatakan dengan gamblang,

> "… Membantu tidak berarti menurunkan derajat orang, kita perlu *menjaga martabat sesama sebagai manusia*, tanpa memandang apa kedudukan, status sosial, dan sebagainya, …"
> (Wawancara pada tanggal 6 September 2011)

Data hasil penelitian ini menunjukkan berbagai pendapat mengenai kontribusi yang disertai harapan dan masukan dari para informan yang sebagian merepresentasikan berbagai strata sosial, berbagai profesi, berbagai latar belakang agama, beragam usia, perempuan maupun pria, dan klerus maupun awam.

8.4 Menuju Gereja yang Makin Mengindonesia

Hasil penelitian lapangan ini memberikan beberapa implikasi yang nyata di dalam konteks Menuju Gereja yang Makin Mengindonesia. Beberapa implikasi tersebut adalah:

Pertama, Gereja Katolik di Indonesia sebagai organisasi formal perlu lebih banyak menghasilkan berbagai produk berupa dokumen-dokumen yang dapat memberikan dampak positif terhadap kehidupan bermasyarakat dan kehidupan mengGereja di Indonesia ini.

Kedua, Gereja Katolik di Indonesia sebagai organisasi formal perlu terus lebih mendukung secara konkret berbagai jejaring sosial khususnya jejaring lintas iman antar berbagai kelompok keagamaan yang ada pada tataran Nasional maupun pada tataran Keuskupan hingga tataran Paroki dengan memperhatikan sustainibilitas dan efektivitas dari jejaring lintas iman ini secara jangka panjang.

Ketiga, Gereja Katolik di Indonesia sebagai organisasi formal perlu lebih dapat meningkatkan kapasitas insitusional sehingga kemampuan untuk berkoordinasi dan bersinergi dapat dijalankan secara lebih cepat dalam waktu yang relatif lebih singkat termasuk di dalam memberikan tanggapan terhadap berbagai kebijakan Pemerintah dan berbagai peristiwa sosial, politik, ekonomi, dan kultural yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia.

Keempat, Gereja Katolik di Indonesia sebagai organisasi formal di dalam menghasilkan berbagai konsep perlu berdasarkan kebutuhan yang nyata (*real need*) dari umat Katolik dan masyarakat Indonesia, sehingga mulai dari proses perancangan hingga pelaksanaan perlu melalui metode dan proses yang lebih partisipatif sehingga lebih dapat berkontribusi secara nyata dan dapat lebih kontekstual sesuai dengan kebutuhan yang nyata di dalam masyarakat Indonesia.

Kelima, Gereja Katolik di Indonesia sebagai organisasi formal perlu lebih mencari mekanisme yang nyata sehingga berbagai produk dokumen dan konsep yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti hingga sampai ke tataran akar rumput di berbagai paroki sehingga berdampak langsung pada umat dan juga bagi masyarakat. Mekanisme nyata ini juga mencakup kemampuan untuk bersinergi dan berkoordinasi lintas paroki dan bahkan lintas Keuskupan.

Keenam, Gereja Katolik di Indonesia sebagai organisasi formal perlu menemukan metode dan proses sosialisasi yang lebih berkesinambungan dan lebih efektif sehingga berbagai dokumen yang berupa produk yang dihasilkan baik oleh KWI maupun oleh Keuskupan dapat lebih dibahas, dipahami dan juga lebih dapat diterapkan oleh berbagai kelompok pada tataran paroki.

Ketujuh, Gereja Katolik di Indonesia sebagai komunitas kaum beriman pada tataran paroki perlu lebih meningkatkan peran setiap anggota Gereja sebagai Saksi Kristus di dalam kehidupan keseharian. Sehingga dapat turut berperan merubah berbagai stereotipe dan prasangka negatif yang ada terutama di dalam konteks kehidupan dan interaksi sosial lintas iman.

Kedelapan, Gereja Katolik di Indonesia sebagai komunitas kaum beriman pada tataran paroki perlu lebih meningkatkan rasa kebersamaan sebagai komunitas (*sense of community)* yang ditumbuhkembangkan oleh pastor paroki, dewan paroki, dan segenap umat.

Kesembilan, untuk mencapai rasa kebersamaan sebagai komunitas yang tinggi, maka Gereja Katolik di Indonesia sebagai komunitas kaum beriman pada tataran paroki perlu mempunyai metode dan proses komunikasi yang setara dan baik antara para pastor paroki, dewan paroki, dan umat. Termasuk transparansi dan akuntabilitas di dalam berbagai kebijakan.

Kesepuluh, Gereja Katolik di Indonesia sebagai komunitas kaum beriman, pada tataran Nasional perlu melakukan reorientasi sehingga tidak hanya

berorientasi pada Gereja Katolik di Jawa. Sehingga perlu ada kerjasama yang lebih konkrit di antara Gereja Katolik di Jawa dengan Gereja Katolik di luar Jawa.

Kesebelas, Gereja Katolik di Indonesia sebagai komunitas kaum beriman perlu secara lebih jelas dan tegas menunjukkan keberpihakan pada berbagai kelompok marginal yang paling membutuhkan. Gereja hadir melalui keterbukaan dan keterlibatan dengan berkontribusi secara nyata dengan menghargai martabat setiap manusia sebagai sesama tanpa membedakan kedudukan dan status sosial.

9. Penutup: Bagaimana dengan Pancasila?

Menuju Gereja yang Makin Mengindonesia secara sosiologis berarti melihat Gereja Katolik di Indonesia baik sebagai organisasi formal maupun sebagai komunitas kaum beriman. Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini maka para informan baik Katolik maupun Muslim mempunyai harapan yang cukup tinggi terhadap peran Gereja Katolik di Indonesia di masa mendatang. Semoga harapan mereka yang disertai beberapa masukan konkrit ini dapat memberikan kontribusi bagi Gereja Katolik di Indonesia yang universal tetapi sekaligus lokal dan kontekstual.

Pertanyaan yang sekarang ini signifikan dan relevan untuk dipertanyakan adalah Bagaimana keterkaitan ini semua dengan Pancasila? Pancasila adalah Ideologi Negara Indonesia. Salah satu permasalahan secara sosiologis adalah bahwa sampai sekarang ini, justru karena menjadi Ideologi Negara, Pancasila belumlah sungguh tertanam secara sosial di dalam Masyarakat Indonesia. Kerap faktor yang dianggap menjadi penyebab utama adalah bahwa metode sosialisasi yang digunakan oleh Negara khususnya Pemerintah sebagai aparat penyelenggara Negara adalah bersifat indoktrinasi dan bahkan dengan cara represif seperti yang pernah dilakukan pada periode Orde Baru (1967-1998). Tetapi jika ditinjau lebih lanjut, persoalan utama bukanlah pada metode sosialisasi tetapi lebih bahwa hingga kini, Pancasila yang adalah Ideologi Negara secara sosial belumlah tertanam di dalam Masyarakat Indonesia (*socially embedded*). Meskipun jika dicermati secara lebih mendalam, setiap sila Pancasila berasal dari nilai dan norma yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, tetapi sebagai satu kesatuan, Ideologi Negara ini belumlah secara sosial dan secara merata tertanam di dalam Masyarakat Indonesia.

Faktor lain, secara sosiologis, Pancasila sebagai Ideologi Negara yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai bagian dari Konstitusi Negara sangat erat keterkaitannya dengan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Harus diakui bahwa masih terdapat sampai kini, beberapa kelompok komunitas di dalam Masyarakat Indonesia yang belum bisa menerima NKRI sebagai format final di dalam hidup bernegara. Sehingga bagi berbagai kelompok komunitas tersebut, legitimasi Pancasila sebagai Ideologi Negara masih terus dipertanyakan

hingga sekarang ini. Bagi mereka, tidak ada istilah NKRI adalah harga mati. Selama hal tersebut masih berlangsung, selama itu pula legitimasi Pancasila masih terus dipertanyakan.

Pancasila masih lebih menjadi "mantra" bagi para pengambil keputusan khususnya elit politik di negeri ini dibandingkan sebagai nilai dan norma kultural dan sosial yang telah secara merata tertanam di dalam Masyarakat Indonesia. Sehingga pertanyaan yang perlu diajukan di sini adalah bagaimana cara untuk membuat Pancasila yang berupa Ideologi Negara tersebut bisa berubah menjadi nilai dan norma sosial dan kultural yang sungguh tertanam di dalam Masyarakat Indonesia.

Tantangan ini yang perlu juga dipikirkan oleh Gereja sebagai komunitas kaum beriman yang sekaligus adalah bagian yang integral dari Masyarakat Indonesia. Terlebih karena Pancasila adalah Ideologi Negara dan belum menjadi nilai dan norma yang secara sosial tertanam di dalam Masyarakat, bagaimana perlu menyikapinya di dalam konteks tarik menarik antara globalisasi pasar dengan desentralisasi komunitas lokal di mana justru peran negara bangsa semakin menurun? Jika peran negara bangsa semakin menurun, maka Pancasila sebagai Ideologi Negara dapat diasumsikan akan cenderung menurun pula perannya. Hal ini bisa berubah jika Pancasila bukan lagi semata-mata sebagai Ideologi Negara, tetapi telah menjadi nilai dan norma sosial dan kultural yang secara sosial telah tertanam di dalam Masyarakat Indonesia. Atau dengan kata lain, secara sosiologis pertanyaan yang perlu diajukan adalah bagaimana Gereja bisa turut berperan di dalam merubah Pancasila dari Ideologi Negara menjadi Modal Sosial dan Modal Kultural Masyarakat Indonesia di mana saling percaya (*trust)* merupakan elemen utama. Inilah tantangan sekaligus peluang yang perlu dijawab oleh Gereja Katolik Indonesia sebagai bagian dari Masyarakat Indonesia.

Francisia SSE Seda, Ph.D.

Staf Pengajar Departemen Sosiologi, FISIP-UI; email: ery.seda09@ui.ac.id

Catatan Akhir

1 Disampaikan dalam Studium Generale Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 19 Agustus 2013.

2 Kevin Fox Gotham, "Racialization and the State: The Housing Act of 1934 and the Origins of the Federal Housing Administration (FHA)," in *Sociological Perspectives* 43(2000:2): 291-316.

3 Max Weber, *The Sociology of Religion. Boston:Beacon*, 1963.

4 M. Granovetter, "Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness," in *American Journal of Sociology*, 91 (1985:3), 481-510.

5 *Bangkit dan bergeraklah! Dokumentasi Hasil Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia*. Sekretariat SAGKI 2005, Januari 2006.

6 Sebagian dari makalah ini sudah pernah dipresentasikan pada Seminar dalam rangka menyongsong Acara Wisuda Program S1 Filsafat dan Program S2 Teologi yang diselenggarakan oleh STFK Ledalero, Maumere, Flores, NTT pada tanggal 20 April 2013.

[7] Sebagian dari makalah ini sudah pernah disampaikan di dalam Seminar Nasional mengenai Ikatan Budaya dan Nasionalisme Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 5 Agustus, 2010 di Jakarta.

[8] Sebagian dari makalah ini sudah pernah disampaikan pada Hari Studi APTIK mengenai Arah Perkembangan Gereja Katolik Pada Masa Yang Akan Datang yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) pada 29 Oktober 2010 di Surabaya.

[9] Kusumadewi, "Relasi Sosial antar Kelompok Agama di Indonesia: Integrasi atau Disintegrasi?," makalah yang belum dipublikasikan, Departemen Sosiologi, FISIP-UI, 2007.

[10] Tadjoeddin, 2002 seperti dikutip oleh Kusumadewi, 2007.

[11] Kusumadewi, 2007.

[12] *Ibid*.

[13] Anthony Giddens, *Sociology*. 6th Ed., Cambridge, Polity Press, 2009.

[14] *(Diambil dari : elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/.../11-00980.pdf)*

[15] Tim Kajian dan Penelitian Johar Baru, Departemen Sosiologi, FISIP-UI. Tawuran, Kemiskinan, Dan Eksklusi Sosial: Suatu Studi Kasus Mengenai Konflik Horizontal di Kecamatan Johar Baru, Kotamadya Jakarta Pusat, 2011.

[16] Badan Pusat Statistik. Data Strategis BPS. Jakarta: BPS, 2008.

[17] Sebagian dari makalah ini sudah pernah dipresentasikan pada Seminar mengenai Tantangan Perubahan Iklim yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia di Depok, 10 Juni 2010.

[18] Agus Sari, "Pasar Karbon dan Potensinya di Indonesia," in *Prisma*, 29, (2010:2).

[19] Daniel Murdiyarso, "Perubahan Iklim: Dari Obrolan Warung Kopi ke Meja Perundingan,"in *Prisma,* 29, (2010:2).

[20] Ismid Hadad, "Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan", in *Prisma,* 29, (2010:2).

[21] *World Commission on Environment and Development, 1987*

[22] Rogers, Jalal, Boyd, *An Introduction to Sustainable Development,* 2008

[23] *Ibid*.

[24] Sajise, Ticsay, Saguiguit, Jr,eds., *Moving Forward: Southeast Asian Perspectives on Climate Change and Biodiversity,* 2010.

[25] Daniel Murdiyarso and Markku Kanninen, "Chapter 4: "An Outlook for Asian Forests in The New Climate Regime," *Climate Change Negotiations: Can Asia Change The Game?* eds., Loh, Stevenson, Tay

[26] Sebagian dari makalah ini pernah dipresentasikan pada Seminar Sehari di dalam rangka mensyukuri anugerah pengakuan 50th Hierarki Gereja Katolik Indonesia yang bertemakan "Menuju Gereja yang Makin Mengindonesia," yang diselenggarakan oleh Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) pada Rabu, 12 Oktober 2011.

[27] E. Troeltsch, *The Social Teachings of the Christian Churches*, vols 1 and 2, Chicago: University of Chicago Press, 1981.

[28] Haralambos and Holborn, *Sociology: Themes and Perspectives*, Sixth Edition. London: HarperCollins Publishers Limited, 2004.

Daftar Pustaka

Anderson, B.,

1991 *Imagined Communities: Reflections on The Origin and Spread of Nationalism*, London: Verso.

Aspinall, E. and G. Fealy, (eds).,

2003 *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation & Democratisation*, Singapore: ISEAS.

Badan Pusat Statistik.
2008 *Data Strategis BPS,* Jakarta: BPS.

Balibar, E. & I. Wallerstein.
1991 *Race, Nation, Class: Ambiguous Identities*, London: Verso.

Giddens, A.
1999 *Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Lives*, London.

Giddens, Ant.,
2009 *Sociology*, 6th ed., Cambridge: Polity Press.

Gotham, K.F.,
2000 "Racialization and the State: The Housing Act of 1934 and the Origins of the Federal Housing Administration (FHA)", in *Sociological Perspectives* 43, (2000:2) 291-316.

Granovetter, M.
1985 "Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness", in *American Journal of Sociology,* 91 (1985:3), 481-510.

Hadad, Ismid.
2010 "Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan" in *Prisma,* 29, (2010:2).

Haralambos, M. and M. Holborn,
2004 *Sociology: Themes and Perspectives*, 6th ed., London: HarperCollins Pub. Limited.

Huntington, S.,
1993 "One clash of civilizations?" Foreign Affairs, 72.3, 1993.

Jameson, F. and M. Miyoshi, eds.,
2001 *The Cultures Of Globalization*: Durham, Duke University Press.

Kaplinsky, R.,
2005 *Globalization, Poverty and Inequality: Between A Rock and A Hard Place*, Cambridge: Polity Press.

Kartodiharjo, H. dan Hira Jhamtani, eds.,
2006 *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*, Jakarta: PT Equinox Pub.

Kusumadewi, Lucia Ratih,
2007 "Relasi Sosial antar Kelompok Agama di Indonesia: Integrasi atau Disintegrasi?", makalah yang belum dipublikasikan, Departemen Sosiologi, FISIP-UI.

Leifer, M., ed.,
2000 *Asian Nationalism*, London: Routledge.

Loh, C., A. Stevenson and S.Tay, eds.,
2008 *Climate Change Negotiations: Can Asia Change The Game?,* Hong Kong: Civic Exchange.

Martinussen, J.,
1997 *Society, State & Market: A Guide to Competing Theories of Development*, London: Zed Books, Ltd.

McMichael, P.,
2004 *Development and Social Change: A Global Perspective,* 3th ed., London, Sage Publications.

Murdiyarso, D.,
2010 *"Perubahan Iklim: Dari Obrolan Warung Kopi ke Meja Perundingan",* in *Prisma* 29 (2010:2).

Rogers, P.P., K.F. Jalal, & J.A. Boyd,
2008 *An Introduction to Sustainable Development,* USA, Earthscan.

Sajise, P.E., M.V. Ticsay, G.C. Saguiguit, Jr., eds.,
2010 *Moving Forward: Southeast Asian Perspectives on Climate Change and Biodiversity,* Singapore: ISEAS Pub.

Sari, Agus,
2010 "Pasar Karbon dan Potensinya di Indonesia", in *Prisma* 29 (2010:2).

Savage, M., et.al.,
2005 *Globalization & Belonging*, London: Sage Pub.

Scott, J.C.,
1998 *Seeing Like A State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*, New Haven: Yale University.

Slater, R.O., B.M. Schutz and S.R. Dorr,
1993 *Global Transformation and The Third World*, Boulder: Lynne Rienner Pub. Inc.

Tim Kajian dan Penelitian Johar Baru, Departemen Sosiologi, FISIP-UI,
2011 *Tawuran, Kemiskinan, Dan Eksklusi Sosial: Suatu Studi Kasus Mengenai Konflik Horizontal di Kecamatan Johar Baru, Kotamadya Jakarta Pusat*.

Troeltsch, E.,
1981 *The Social Teachings of the Christian Churches*, vols 1 & 2, Chicago: University of Chicago Press.

Warren, C. and J.F. McCarthy, eds.,
2009 *Community, Environment and Local Governance in Indonesia: Locating the commonweal,* Oxon: Routledge.

Waters, M.,
2001 *Globalization*, 2nd ed., London: Routledge.

Weber, M.,
1963 *The Sociology of Religion*, Boston: Beacon.

1987 *World Commission On Environment and Development*.

Wuthnow, R.,
1988 "Sociology of Religion,", in N.J. Smelser., ed., *Handbook of Sociology*, Newbury Park, CA: Sage.

Dokumen Gereja

Konferensi Waligereja Indonesia,
2006 *Habitus Baru: Ekonomi yang berkeadilan. Keadilan bagi Semua: Pendekatan Sosio-Ekonomi. Nota Pastoral Sidang Konferensi Waligereja Indonesia 6-16 November 2006*, Jakarta: Sekretariat Konferensi Waligereja Indonesia.

Panitia Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia 2000,
2000 *Gereja yang Mendengarkan: Memberdayakan Komunitas Basis Menuju Indonesia Baru*, Jakarta: Panitia Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia.

Sunarko, A., Al. Andang L. Binawan, Ig. Haryanto, M. Hartiningsih dan Raymond Toruan, eds.,
2006 *Bangkit dan Bergeraklah: Dokumentasi Hasil Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia 2005*, Jakarta: Obor.

Jurnal

Masyarakat Jurnal Sosiologi, "Pembangunan Sosial dan Lingkungan,". Puska LabSosio, FISIP-UI, 13 (2006:2).

Prisma Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi, "Perubahan Iklim & Tantangan Peradaban," LP3ES, 29 (2010).